



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KARIM SURYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **868409**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.707.250.000**

1. Tanah Seluas 2.026 m2 di KAB / KOTA SUBANG, Rp. 209.600.000
2. Tanah Seluas 1.695 m2 di KAB / KOTA SUBANG, Rp. 211.500.000
3. Tanah Seluas 1.121 m2 di KAB / KOTA SUBANG, Rp. 118.100.000
4. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA SUBANG, Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA SUBANG, Rp. 93.050.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.321 m2/36 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.125.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 242.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	8.074.250.000
III. HUTANG	Rp.	172.520.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.901.730.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.